Discourse: Journal of Social Studies and Education
Vol. 4 No. 1, November 2026, pp. 134-156
ISSN: 3032-6516, DOI: 10.69875/djosse.v4i1.592

Multi-Actor Networks in Indonesia's Gastrodiplomacy Policy: An Analysis of Indonesia Spice Up the World

Jejaring Multi-Aktor Dalam Kebijakan Gastrodiplomasi Indonesia: Analisis Indonesia Spice Up the World

Primadiana Yunita[1], Meilinda Sari Yayusman[2], Wishnu Mahendra[3],

[1,3]Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia
[2]Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received: August 30, 2026
Reviced: October 05, 2026
Accepted: October 24, 2026

Kata Kunci:
Gastrodiplomasi; Jejaring Kebijakan; Aktor Non-Negara; Diplomasi Publik; Indonesia Spice Up the World.

Keywords:
Gastrodiplomacy; Policy Network; Non-State Actors; Public Diplomacy; Indonesia Spice Up the World.

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2026 by Author. Published by PT Citra Media Publishing.

ABSTRAK

Gastrodiplomasi kerap dipahami sebagai strategi negara yang menggunakan makanan untuk diplomasi publik, promosi budaya, dan penguatan citra nasional. Perspektif tersebut belum sepenuhnya menjelaskan pelaksanaannya melalui relasi antarlembaga yang melibatkan aktor negara dan nonnegara dengan kepentingan serta sumber daya berbeda. Artikel ini menganalisis jejaring multi-aktor dalam Program *Indonesia Spice Up the World* (ISUTW) dengan menempatkan relasi antaraktor sebagai unit analisis. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif berbasis analisis dokumen terhadap 12 dokumen kebijakan, publikasi resmi, dataset, dan artikel ilmiah periode 2020–2025. Analisis mengikuti prosedur READ (*Ready Materials, Extract Data, Analyse Data, Distil Findings*) pada dimensi konstelasi aktor, kepentingan, sumber daya, interdependensi, pola interaksi, pengelolaan jejaring, serta distribusi pengaruh. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga peran dominan, yaitu *policy-steering core*, *intermediary/broker*, dan *frontline implementers*, yang dapat tumpang tindih menurut arena dan tahap kebijakan. ISUTW menunjukkan konfigurasi *state-led, non-state-dependent network*: pemerintah memimpin melalui kewenangan koordinasi, regulasi, pembiayaan, data, dan akses diplomatik, tetapi implementasi bergantung pada sumber daya substantif aktor nonnegara. Integrasi jejaring masih dibatasi oleh perbedaan logika sektoral, ketidakjelasan mandat aktor nonnegara, koordinasi berbasis kegiatan, dan belum terdokumentasinya secara konsisten mekanisme umpan balik dari pelaksana garis depan. Studi ini mengembangkan *networked gastrodiplomacy* sebagai lensa analitis untuk menjelaskan hubungan antara interdependensi sumber daya, peran jejaring, dan distribusi pengaruh.

ABSTRACT

Gastrodiplomacy is often understood as a state strategy that uses food for public diplomacy, cultural promotion, and national image-building. This perspective does not fully explain how its implementation takes place through inter-organizational relations involving state and non-state actors with different interests and resources. This article analyzes the multi-actor network of the Indonesia Spice Up the World (ISUTW) program by treating inter-actor relations as the unit of analysis. The study employs a qualitative case-study design based on document analysis of 12 policy documents, official publications, datasets, and scholarly articles published between 2020 and 2025. The analysis follows the READ procedure (Ready Materials, Extract Data, Analyse Data, Distil Findings) across the dimensions of actor constellation, interests, resources, interdependence, interaction patterns, network management, and distribution of influence. The findings identify three dominant network roles: policy-steering core, intermediary/broker, and frontline implementers, which may overlap across policy arenas and stages. ISUTW reflects a state-led, non-state-dependent network: government retains leadership through coordination authority, regulation, financing, data, and diplomatic access, while implementation depends on substantive resources controlled by non-state actors. Network integration remains constrained by divergent sectoral logics, unclear

Corresponding author: Primadiana Yunita
E-mail addresses: primadiana@ub.ac.id

mandates for non-state actors, event-based coordination, and the lack of consistently documented feedback mechanisms from frontline implementers. The study develops networked gastrodiplomacy as an analytical lens for explaining the relationship between resource interdependence, network roles, and the distribution of influence.

PENDAHULUAN

Makanan tidak hanya berfungsi sebagai komoditas konsumsi, tetapi juga membawa identitas, memori, pengetahuan, dan nilai budaya. Dalam hubungan internasional, kedekatan makanan dengan pengalaman sehari-hari menjadikannya medium yang relatif mudah diakses untuk membangun pengenalan dan kedekatan dengan publik asing. Rasa, aroma, bahan, teknik pengolahan, cara penyajian, serta cerita yang menyertai makanan dapat membentuk pemahaman mengenai sejarah, keragaman, dan identitas masyarakat asalnya. Karena itu, gastrodiplomasi berkembang sebagai bagian dari diplomasi publik yang menggunakan makanan dan kebudayaan kuliner untuk membangun daya tarik dan persepsi positif terhadap suatu negara (Rockower, 2012; White et al., 2019). Perkembangan kajian terbaru menunjukkan bahwa gastrodiplomasi tidak lagi cukup dipahami sebagai kampanye kuliner, melainkan sebagai praktik yang berhubungan dengan *nation branding*, perdagangan, pariwisata, diaspora, dan hubungan sosial yang menopang perjumpaan dengan publik luar negeri (Li & Mok, 2025).

Pendekatan yang menempatkan negara sebagai aktor utama tetap penting karena program gastrodiplomasi nasional membutuhkan otoritas kebijakan, anggaran, standardisasi, dukungan diplomatik, dan koordinasi lintas lembaga. Namun, perspektif yang terlalu *state-centered* berisiko menyederhanakan proses implementasi. Literatur diplomasi publik kontemporer menunjukkan bahwa aktor nonnegara tidak sekadar berfungsi sebagai saluran pesan pemerintah, tetapi dapat menjadi pemilik pengetahuan, penggagas agenda, produsen simbol budaya, pengelola jaringan pasar, dan pihak yang berhubungan langsung dengan publik asing (Ayhan, 2019; Limani & Limani, 2022; Moise, 2023). Pada saat yang sama, negara tetap memegang posisi struktural yang sulit digantikan dalam komunikasi dan diplomasi publik karena memiliki legitimasi, infrastruktur diplomatik, dan kapasitas koordinasi nasional (Yun, 2022). Karena itu, persoalan analitis yang lebih relevan bukan memilih antara negara atau nonnegara, melainkan menjelaskan bagaimana keduanya terhubung, saling membutuhkan, dan mendistribusikan pengaruh dalam proses kebijakan (Zaharna & Huang, 2022).

Karakter multi-aktor tersebut terlihat jelas dalam Program *Indonesia Spice Up the World* (ISUTW). Agenda ini mulai dikonsolidasikan pada 2020 dan diluncurkan secara resmi pada 4 November 2021 dalam rangkaian Expo 2020 Dubai sebagai program lintas kementerian/lembaga dan swasta (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2020; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Pada siklus pertamanya, ISUTW menargetkan peningkatan jumlah restoran Indonesia di luar negeri dan peningkatan ekspor bumbu serta rempah. Target tersebut menempatkan gastrodiplomasi pada persilangan beberapa arena kebijakan sekaligus: diplomasi publik, perdagangan, industri pangan, pertanian, pariwisata, pembiayaan, standardisasi produk, dan pengembangan usaha restoran (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2022). Dengan cakupan demikian, pelaksanaan program tidak mungkin bergantung pada satu organisasi atau satu jenis sumber daya.

Kajian gastrodiplomasi Indonesia telah berkembang cukup pesat. Pujayanti (2017) menempatkan gastrodiplomasi sebagai instrumen untuk memperkuat diplomasi Indonesia, sementara studi yang lebih baru memperlihatkan hubungan gastrodiplomasi dengan *nation*

branding, promosi produk, dan strategi diplomasi publik (Al Ghafiqi, 2023; Fathun, 2023; Putri, 2026). Studi mengenai diaspora menunjukkan bahwa restoran dan komunitas Indonesia di luar negeri dapat menjadi *frontline messenger* yang menghadirkan pengalaman kuliner secara langsung kepada publik asing (Trihartono et al., 2020; Yayusman et al., 2023). Penelitian lain memperlihatkan peran diaspora dalam promosi tempe di Amerika Serikat, program *co-branding* di Australia, maupun promosi kuliner di Tokyo dan Prancis (Abhiyoga & Febreani, 2021; Adinda et al., 2025; Turgarini et al., 2025; Wijaya et al., 2024). Khusus mengenai ISUTW, Yayusman dan Mulyasari (2024) mengidentifikasi keterlibatan berbagai aktor negara dan nonnegara serta memperlihatkan pentingnya jaringan restoran, asosiasi, dan diaspora dalam pengembangan pasar gastrodiplomasi Indonesia.

Walaupun literatur tersebut telah memperkaya pemahaman mengenai siapa yang terlibat dalam gastrodiplomasi Indonesia, masih terdapat ruang analitis mengenai bagaimana jejaring antarlembaga itu bekerja. Daftar pemangku kepentingan tidak otomatis menunjukkan siapa yang menguasai agenda, sumber daya apa yang dipertukarkan, aktor mana yang menjadi penghubung, dan apakah keterlibatan menghasilkan pengaruh terhadap keputusan. Sebuah organisasi dapat tercantum sebagai mitra program tetapi tidak memiliki akses terhadap penetapan prioritas. Sebaliknya, aktor lain dapat menguasai informasi pasar atau legitimasi budaya yang sangat penting, tetapi tetap berada jauh dari pusat pengambilan keputusan. Karena itu, keterlibatan perlu dibedakan antara kehadiran, partisipasi, pengaruh, dan kendali.

Kerangka *governance network* atau jejaring tata kelola memberikan perangkat untuk membaca dimensi relasional tersebut. Jejaring tata kelola berangkat dari asumsi bahwa persoalan publik yang kompleks ditangani melalui interaksi organisasi yang secara hukum relatif otonom, tetapi saling bergantung karena tidak ada satu aktor yang menguasai seluruh kewenangan, pengetahuan, sumber daya, dan kapasitas implementasi (Klijn et al., 2025; Wang & Ran, 2023). Literatur menunjukkan bahwa struktur jaringan, posisi *broker*, mekanisme koordinasi, serta distribusi sumber daya dapat memengaruhi kemampuan jejaring menghasilkan tindakan kolektif (Fonseca, 2021; Hu et al., 2023; van den Oord et al., 2023). Namun, jejaring bukan sinonim dari hubungan yang setara. Pengaruh dapat tetap terkonsentrasi pada aktor yang menguasai agenda, anggaran, atau aturan formal, sementara aktor lain hanya memperoleh ruang konsultasi (Maron & Benish, 2022; Naveed & Azhar, 2022). Karena itu, inklusivitas jejaring perlu dinilai tidak hanya dari akses, tetapi juga dari peluang untuk memengaruhi keputusan (Reggi et al., 2022).

Selain struktur, jejaring membutuhkan pengelolaan. Fungsi penyelarasan, mobilisasi, integrasi, arbitrase, dan pemantauan diperlukan ketika anggota jejaring membawa tujuan sektoral yang berbeda (Wegner & Verschoore, 2022). Jejaring yang dibentuk atau dimandatkan pemerintah juga membutuhkan mekanisme fasilitasi agar koordinasi tidak berhenti pada penunjukan organisasi pemimpin (Krogh, 2022). Dalam jangka panjang, hubungan antara desain kelembagaan dan strategi pengelolaan turut menentukan kesinambungan jejaring serta akuntabilitas kinerja kolektif (Busscher et al., 2022; Saz-Carranza et al., 2020). Perspektif ini relevan untuk ISUTW karena keberhasilan promosi tidak hanya bergantung pada kemampuan mengadakan kegiatan, tetapi juga pada kemampuan menyatukan logika diplomasi, perdagangan, pariwisata, industri, budaya, dan keberlanjutan usaha.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan ISUTW sebagai jejaring kebijakan dan menjadikan relasi antaraktor sebagai unit analisis. Pertanyaan

utamanya adalah: bagaimana jejaring multi-aktor dibentuk dan dikelola dalam kebijakan gastrodiplomasi Indonesia melalui Program ISUTW? Pertanyaan tersebut dijabarkan menjadi tiga fokus: (1) bagaimana konstelasi dan pembagian peran antaraktor; (2) bagaimana sumber daya dan interdependensi didistribusikan; serta (3) bagaimana struktur koordinasi dan distribusi pengaruh membentuk kapasitas jejaring. Kebaruan penelitian terletak pada pergeseran dari identifikasi aktor menuju analisis arsitektur relasional, pertukaran sumber daya, fungsi *brokerage*, serta perbedaan antara *inclusion* dan *influence*. Kerangka *governance network* digunakan untuk menjelaskan struktur relasi, interdependensi sumber daya, koordinasi, dan distribusi pengaruh antaraktor. Namun, dalam konteks gastrodiplomasi, hubungan tersebut memiliki karakter substantif yang lebih spesifik karena daya tarik nasional diproduksi melalui keterhubungan antara kewenangan kebijakan dan diplomatik, pengetahuan serta legitimasi budaya kuliner, kapasitas produksi dan distribusi, jaringan pasar, dan interaksi langsung dengan publik asing. Atas dasar itu, artikel ini menggunakan istilah *networked gastrodiplomacy* atau gastrodiplomasi berjejaring sebagai lensa analitis yang bersifat spesifik pada domain gastrodiplomasi, bukan sebagai pengganti teori *governance network*. Lensa ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sumber daya yang tersebar pada aktor negara dan nonnegara dipertukarkan, bagaimana fungsi *brokerage* menghubungkan pusat kebijakan dengan arena implementasi, serta bagaimana keterlibatan aktor dapat berbeda dari kapasitas mereka untuk memengaruhi keputusan. Dengan demikian, artikel ini mengajukan argumen bahwa ISUTW menunjukkan konfigurasi *state-led, non-state-dependent network*: pemerintah mempertahankan posisi utama dalam penetapan agenda, koordinasi, regulasi, pembiayaan, data, dan akses diplomatik, tetapi implementasinya bergantung pada pengetahuan kuliner, legitimasi budaya, jaringan pasar, produk, kreativitas, dan interaksi langsung dengan publik asing yang banyak dikuasai aktor non-negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berbasis analisis dokumen. Kasus yang dikaji adalah Program *Indonesia Spice Up the World* pada siklus pertama, yaitu sejak pembentukan agenda pada 2020, peluncuran resmi pada 2021, hingga pelaksanaan utama sampai 2024. Dokumen tahun 2025 digunakan secara terbatas untuk menelusuri warisan kelembagaan setelah siklus pertama, khususnya pengembangan basis data restoran Indonesia di luar negeri dan kemunculan program lanjutan. Batas temporal tersebut dipilih agar analisis dapat membedakan proses formulasi, implementasi, dan kesinambungan kebijakan tanpa menganggap seluruh perkembangan gastrodiplomasi Indonesia sebagai satu episode yang homogen.

Analisis dokumen dipilih karena tujuan penelitian adalah merekonstruksi desain formal, komposisi, pembagian peran, representasi hubungan antaraktor, serta indikasi persoalan koordinasi dalam kebijakan. Proses analisis mengikuti READ approach dari Dalglish et al. (2020), yaitu Ready materials, Extract data, Analyse data, dan Distil findings. Pendekatan ini membantu menetapkan batas korpus secara transparan, mengekstraksi informasi secara sistematis, mempertimbangkan posisi institusional dokumen, serta merumuskan temuan yang berhubungan langsung dengan pertanyaan penelitian.

Dokumen dipilih secara purposif berdasarkan empat kriteria: (1) diterbitkan pada 2020–2025; (2) membahas pembentukan, koordinasi, pelaksanaan, aktor, atau kesinambungan ISUTW; (3) berasal dari lembaga resmi atau publikasi ilmiah yang dapat diverifikasi; dan (4) memuat informasi mengenai aktor, sumber daya, peran, hubungan,

target, atau persoalan koordinasi. Sebanyak 12 dokumen digunakan sebagai korpus empiris utama. Pemilihan ini tidak dimaksudkan untuk mencapai representasi statistik, melainkan untuk memperoleh coverage yang memadai atas fase waktu, posisi institusional, dan fungsi kebijakan: dokumen pemerintah pusat untuk desain dan target, naskah kebijakan untuk perspektif implementasi, publikasi perwakilan diplomatik untuk praktik di negara tujuan, artikel ilmiah untuk aktor nonnegara dan diaspora, serta dataset resmi untuk pelembagaan informasi pelaksana garis depan. Artikel ilmiah yang termasuk dalam korpus diperlakukan sebagai sumber dokumenter sekunder untuk merekonstruksi posisi dan pengalaman aktor nonnegara, dan dibedakan dari literatur konseptual yang digunakan untuk membangun kerangka analisis.

Tabel 1. Korpus Empiris dan Relevansinya terhadap Analisis Jejaring ISUTW

Kode	Dokumen/Sumber	Jenis	Kontribusi Data
D1	Kemenko Marves (2020), koordinasi awal penyusunan ISUTW	Publikasi resmi	Pembentukan agenda dan kepemimpinan koordinasi
D2	Kemenko Perekonomian (2021), peluncuran ISUTW di Expo 2020 Dubai	Publikasi resmi	Legitimasi politik dan peluncuran program
D3	Kemenko Marves (2022), Laporan Kinerja	Dokumen kebijakan	Target, rencana aksi, pembiayaan, dan aktor lintas sektor
D4	Ramanda (2022), peran strategis Kementerian Luar Negeri	Naskah kebijakan	Peran diplomatik, kerja sama, regulasi, dan struktur kebijakan
D5	Rozuah (2022), promosi digital ISUTW	Naskah kebijakan	Aktor nonnegara dan komunikasi digital
D6	Trihartono et al. (2020), diaspora sebagai frontline messenger	Artikel ilmiah	Peran diaspora dan restoran dalam implementasi
D7	Yayusman & Mulyasari (2024)	Artikel ilmiah	Daftar aktor, kongres gastrodiplomasi, dan desain program
D8	KBRI Oslo (2024), Festival Indonesia Spice Up Oslo	Publikasi resmi	Pelaksanaan oleh perwakilan diplomatik dan mitra lokal
D9	KBRI Den Haag (2024), Indonesia Spice Week Amsterdam	Publikasi resmi	Promosi, seminar, demonstrasi kuliner, dan mitra lokal
D10	Adinda et al. (2025), pandangan diaspora di Prancis	Artikel ilmiah	Kesenjangan kebijakan pemerintah dan inisiatif diaspora

Kode	Dokumen/Sumber	Jenis	Kontribusi Data
D11	Satu Data Kemlu (2025), data restoran Indonesia di luar negeri	Dataset resmi	Institusionalisasi data dan pemetaan pelaksana garis depan
D12	Kementerian Luar Negeri (2025), peluncuran SRASA	Publikasi resmi	Kesinambungan agenda pasca-ISUTW

Sumber: Disusun penulis berdasarkan korpus penelitian.

Untuk menjaga batas inferensi, temuan dibedakan ke dalam tiga tingkat bukti. Pertama, relasi terdokumentasi, yaitu hubungan, keterlibatan, mandat, atau pertukaran sumber daya yang dinyatakan secara eksplisit dalam korpus. Kedua, relasi yang diinferensikan secara analitis, yaitu fungsi atau posisi yang ditafsirkan berdasarkan kombinasi mandat, sumber daya, tahapan keterlibatan, dan hubungan yang tercatat dalam dokumen. Ketiga, relasi yang belum dapat diverifikasi, terutama interaksi informal, negosiasi, konflik, intensitas hubungan, *brokerage* aktual, dan pengaruh terhadap keputusan tertentu yang tidak direkam secara memadai dalam korpus. Pembedaan ini digunakan secara konsisten dalam interpretasi hasil agar analisis tidak melampaui kapasitas bukti dokumenter.

Pada tahap *Ready materials*, setiap dokumen diinventarisasi berdasarkan tahun, penerbit, tujuan, jenis, dan posisi kelembagaannya. Pada tahap *Extract data*, isi dokumen dipindahkan ke matriks yang memuat nama aktor, kategori aktor, kepentingan, sumber daya, bentuk hubungan, tahapan keterlibatan, serta masalah koordinasi. Pada tahap *Analyse data*, pengodean dilakukan secara deduktif berdasarkan konsep governance network dan secara induktif untuk menangkap pola yang muncul dari dokumen. Pada tahap *Distil findings*, kode dikelompokkan menjadi tema tentang peran aktor dalam jejaring, interdependensi sumber daya, kepemimpinan negara, posisi broker, pelaksana garis depan, fragmentasi tujuan, serta kesenjangan integrasi.

Kerangka analisis menggunakan tujuh dimensi: konstelasi aktor, persepsi dan kepentingan, sumber daya, interdependensi, pola interaksi, pengelolaan jejaring, serta kekuasaan dan pengaruh. Dimensi terakhir digunakan untuk membedakan empat tingkat keterlibatan: kehadiran, partisipasi, pengaruh, dan kendali. Kehadiran berarti aktor tercantum atau hadir dalam forum; partisipasi berarti aktor memberikan informasi atau usulan; pengaruh terjadi ketika masukan atau sumber daya aktor mengubah keputusan; sedangkan kendali merujuk pada kemampuan menentukan agenda, aturan, atau alokasi sumber daya. Pembedaan ini digunakan agar luasnya daftar aktor tidak otomatis dibaca sebagai kesetaraan dalam jejaring.

Tabel 2. Operasionalisasi Dimensi Analisis Jejaring Tata Kelola ISUTW

Dimensi	Fokus	Pertanyaan Analitis
Konstelasi aktor	Komposisi dan peran dalam jejaring	Siapa yang terlibat, pada tahap apa, dan dalam posisi apa?
Persepsi dan kepentingan	Cara aktor mendefinisikan tujuan program	Apakah ISUTW dipahami sebagai diplomasi, perdagangan,

Dimensi	Fokus	Pertanyaan Analitis
		pariwisata, industri, atau budaya?
Sumber daya	Kewenangan, anggaran, pengetahuan, jaringan, legitimasi, produk, data	Sumber daya apa yang dikuasai masing-masing aktor?
Interdependensi	Hubungan saling membutuhkan	Mengapa aktor tidak dapat mencapai tujuan tanpa aktor lain?
Pola interaksi	Forum, koordinasi, kerja sama, aliran informasi	Apakah hubungan bersifat rutin, formal, proyek, atau insidental?
Pengelolaan jejaring	Penyelarasan, mobilisasi, integrasi, arbitrase, pemantauan	Bagaimana perbedaan kepentingan dan pembagian tugas dikelola?
Kekuasaan dan pengaruh	Kemampuan menentukan agenda dan alokasi sumber daya	Siapa yang hadir, berpartisipasi, memengaruhi, dan mengendalikan keputusan?

Sumber: Adaptasi kerangka governance network (Wang & Ran, 2023; Wegner & Verschoore, 2022; Klijn et al., 2025).

Keabsahan analisis diperkuat melalui triangulasi jenis dokumen. Informasi mengenai target dan koordinasi dibandingkan antara laporan pemerintah, naskah kebijakan Kementerian Luar Negeri, dan artikel ilmiah; informasi mengenai diaspora dibandingkan antara penelitian awal, kajian ISUTW, dan studi terbaru di negara tujuan. Analisis juga memperhatikan keterbatasan posisi sumber: dokumen pemerintah cenderung menampilkan desain formal dan capaian program, sedangkan studi akademik dapat mengungkap jarak antara desain dan pengalaman implementasi. Penelitian ini tidak mengukur centrality secara kuantitatif dan tidak mengklaim bahwa seluruh interaksi informal dapat direkonstruksi dari dokumen. Karena itu, hasil terutama menjelaskan arsitektur formal, distribusi sumber daya, dan kapasitas jejaring yang terlihat dalam korpus.

HASIL

Institusionalisasi Jejaring Kebijakan Gastrodiplomasi dalam Program ISUTW

Korpus penelitian menunjukkan bahwa hubungan antarpelaku dalam gastrodiplomasi Indonesia telah terdokumentasi sebelum ISUTW diluncurkan sebagai program nasional. Sejumlah dokumen mencatat pelaksanaan festival, kerja sama dengan restoran, demonstrasi memasak, kegiatan perwakilan diplomatik, serta promosi pariwisata dan produk yang melibatkan kementerian, perwakilan diplomatik, *chef*, ahli gastronomi, restoran, asosiasi, komunitas, dan pelaku bisnis. Bukti tersebut menunjukkan adanya relasi yang terdokumentasi melalui kegiatan dan forum tertentu, meskipun korpus penelitian tidak memungkinkan untuk memastikan intensitas, kesinambungan, maupun bentuk interaksi informal di antara para aktor. Dengan demikian, perkembangan sebelum ISUTW

lebih tepat dibaca sebagai terbentuknya basis hubungan antaraktor yang kemudian dapat dikonsolidasikan ke dalam struktur program yang lebih formal.

Kongres Gastrodiplomasi Indonesia pada 2020 merupakan salah satu titik konsolidasi yang terdokumentasi. Yayusman dan Mulyasari (2024) menunjukkan bahwa forum tersebut diprakarsai oleh aktor nonnegara dan mempertemukan pemerintah, *chef*, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, serta komunitas. Bukti ini menunjukkan bahwa aktor nonnegara memiliki ruang dalam proses artikulasi agenda sebelum ISUTW diformalkan. Berdasarkan posisi Indonesia Culinary Institute sebagai penggagas forum dan penghubung sejumlah kelompok aktor, organisasi tersebut dapat diinferensikan menjalankan fungsi yang menyerupai *policy entrepreneur* dan *broker* pada tahap pembentukan agenda. Namun, karena korpus tidak merekam secara langsung proses negosiasi, pertukaran informasi, maupun pengaruh terhadap keputusan tertentu, penelitian ini tidak mengklaim bahwa fungsi *brokerage* tersebut telah terverifikasi pada seluruh proses pembentukan kebijakan. Dengan kata lain, keberadaan forum dan peran penghubungnya terdokumentasi, sedangkan tingkat pengaruh aktual terhadap keputusan merupakan inferensi analitis berdasarkan posisi dan aktivitas yang tercatat dalam dokumen.

Setelah ISUTW diformalkan, bukti dokumenter menunjukkan penguatan koordinasi formal oleh pemerintah. Kemenko Marves tercatat mengoordinasikan penyusunan program dan menghubungkan kementerian/lembaga dengan pihak swasta, asosiasi, pelaku usaha, dan diaspora (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2020). Peluncuran pada Expo 2020 Dubai selanjutnya memberikan legitimasi politik dan diplomatik serta menetapkan target lintas sektor (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Berdasarkan bukti tersebut, ISUTW dapat dipahami sebagai proses institusionalisasi jejaring, yaitu ketika hubungan antaraktor yang sebelumnya tersebar mulai dikonsolidasikan ke dalam nama program, struktur koordinasi, target, dan rencana aksi nasional. Namun, dokumen yang tersedia belum cukup untuk memverifikasi apakah penguatan koordinasi formal tersebut juga menghasilkan negosiasi yang lebih intensif, penyelesaian konflik antarkepentingan, atau distribusi pengaruh yang lebih seimbang di antara aktor.

Struktur dan Diferensiasi Peran Aktor dalam Jejaring ISUTW

Analisis dokumen menunjukkan bahwa pembagian aktor hanya berdasarkan status negara dan nonnegara tidak cukup untuk menjelaskan fungsi dan posisi mereka dalam jejaring ISUTW. Aktor dengan status kelembagaan berbeda dapat menjalankan fungsi yang serupa, sedangkan organisasi yang sama-sama berada dalam kategori pemerintah atau nonpemerintah dapat memiliki akses, sumber daya, dan kedekatan yang berbeda terhadap proses pengambilan keputusan. Karena itu, penelitian ini memetakan aktor berdasarkan peran dalam jejaring (*network roles*), bukan sebagai kategori kelembagaan yang bersifat tetap dan eksklusif.

Penempatan aktor ke dalam peran jejaring didasarkan pada empat indikator empiris yang ditelusuri dalam korpus dokumen, yaitu: **(**1) kewenangan atau mandat formal dalam program; (2) sumber daya dominan yang dikuasai, seperti regulasi, anggaran, pengetahuan, jaringan, legitimasi budaya, akses pasar, dan akses diplomatik; (3) posisi aktor dalam tahapan kebijakan, mulai dari pembentukan agenda, koordinasi, fasilitasi, hingga implementasi; serta (4) bentuk hubungan yang terdokumentasi dengan aktor lain dan dengan publik atau pasar di negara tujuan. Berdasarkan kombinasi indikator tersebut, jejaring ISUTW dapat dibaca melalui tiga peran utama: *policy-steering core*,

intermediary/broker, dan *frontline implementers*. Ketiga peran tersebut merupakan perangkat analitis untuk membaca fungsi dominan aktor dalam jejaring dan tidak dimaksudkan sebagai kategori yang saling meniadakan. Seorang aktor dapat menjalankan lebih dari satu peran pada tahapan atau arena kebijakan yang berbeda.

Peran *policy-steering core* terutama ditandai oleh kewenangan formal untuk menetapkan agenda, mengoordinasikan program, mengatur, menyediakan pembiayaan, melakukan standardisasi, atau mengelola akses diplomatik dan data resmi. Dalam korpus, fungsi ini terutama terlihat pada kementerian koordinator, kementerian teknis, Kementerian Luar Negeri, lembaga perencanaan dan riset, regulator, serta badan usaha milik negara yang relevan. Posisi tersebut memberi aktor pemerintah kapasitas relatif lebih besar untuk membentuk arah, prioritas, dan desain formal program. Namun, posisi dalam *policy-steering core* tidak berarti seluruh aktor pemerintah menjalankan fungsi yang sama pada setiap arena. Perwakilan diplomatik, misalnya, dapat menjalankan fungsi koordinatif sebagai representasi negara, tetapi pada saat yang sama juga berinteraksi langsung dengan restoran, komunitas, pelaku usaha, dan publik di negara tujuan.

Peran *intermediary/broker* ditandai oleh kemampuan menghubungkan aktor atau arena yang memiliki sumber daya, kepentingan, dan bahasa kebijakan yang berbeda. Sumber daya penting pada posisi ini meliputi pengetahuan profesional, jaringan anggota, reputasi, legitimasi budaya, dan kapasitas mengagregasi atau menerjemahkan kepentingan. Indonesia Culinary Institute, Dewan Rempah Indonesia, asosiasi industri makanan dan minuman, asosiasi gastronomi, organisasi *chef*, asosiasi jasa boga, dan ahli kuliner dapat menempati peran perantara ketika mereka menghubungkan kebutuhan pemerintah dengan pengetahuan profesi, industri, dan praktik di lapangan. Namun, sebagaimana keterbatasan data dokumen yang telah dijelaskan, klasifikasi ini menunjukkan potensi atau fungsi penghubung yang terdokumentasi, bukan bukti bahwa setiap aktor tersebut secara konsisten menjalankan *brokerage* aktual dalam seluruh proses kebijakan.

Peran *frontline implementers* ditandai oleh kedekatan dengan arena implementasi, pasar, dan publik asing. Diaspora, restoran, *chef*, katering, eksportir, importir, produsen, UMKM, distributor, media, *influencer*, serta komunitas lokal di negara tujuan berada pada posisi ini ketika mereka menerjemahkan program menjadi produk, pengalaman kuliner, aktivitas pasar, narasi, dan interaksi langsung dengan publik. Trihartono et al. (2020), misalnya, menyebut diaspora sebagai *frontline messenger* karena menghadirkan pengalaman kuliner melalui interaksi sehari-hari. Kedekatan dengan publik tersebut menjadikan aktor garis depan penting bagi implementasi gastrodiplomasi, tetapi tidak dengan sendirinya memberikan akses yang setara terhadap proses pengambilan keputusan. Aktor seperti *chef* juga dapat berpindah atau menjalankan dua peran sekaligus: sebagai pelaksana garis depan ketika berinteraksi langsung dengan publik, dan sebagai perantara ketika terlibat dalam asosiasi, forum profesional, atau konsultasi kebijakan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan pasar dan publik asing tidak otomatis menghasilkan kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan.

Tabel 3. Klasifikasi Peran Jejaring Berdasarkan Indikator Empiris, Sumber Daya, dan Fungsi dalam ISUTW

Peran jejaring	**Indikator empiris utama**	**Aktor yang dominan menjalankan peran**	**Sumber daya dominan**	**Fungsi utama**	**Potensi tumpang tindih**
Policy-steering core	Memiliki mandat/kewenangan formal; terlibat dalam penetapan agenda, koordinasi, regulasi, pembiayaan, standardisasi, atau pengelolaan data	Kementerian koordinator, kementerian teknis, Kemlu/perwakilan RI, BPOM, Bappenas, BRIN, BUMN	Kewenangan, regulasi, anggaran, diplomasi, data, riset, standardisasi	Menetapkan agenda, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, dan mengawasi	Perwakilan RI dapat sekaligus menjalankan fungsi *frontline* ketika berhubungan langsung dengan mitra dan publik di negara tujuan
Inter-mediary/ broker	Memiliki jaringan lintas kelompok; membawa pengetahuan profesional/teknis; mampu menghubungkan, menerjemahkan, atau mengagregasi kepentingan	ICI, Dewan Rempah, asosiasi industri, asosiasi gastronomi, organisasi *chef*, APJI, ahli kuliner	Pengetahuan, jaringan anggota, reputasi, legitimasi budaya, agregasi kepentingan	Menghubungkan inti kebijakan dengan profesi, industri, komunitas, dan pelaksana	*Chef*, asosiasi, atau aktor profesional dapat sekaligus menjadi *frontline implementer*
Frontline imple-menters	Berinteraksi langsung dengan pasar/publik; melaksanakan kegiatan, produksi, distribusi, promosi, atau pelayanan di negara tujuan	Diaspora, restoran, *chef*, katering, eksportir/importir, produsen, UMKM, media, *influencer*	Akses pasar, produk, pengalaman lokal, interaksi publik, kreativitas, komunikasi	Menerjemahkan kebijakan menjadi pengalaman kuliner, aktivitas pasar, narasi, dan sumber umpan balik	Diaspora, *chef*, restoran, atau perwakilan RI dapat menjalankan fungsi perantara ketika menghubungkan pengalaman lapangan dengan aktor kebijakan

Sumber: Analisis dokumen D1–D12. Penempatan aktor menunjukkan peran dominan yang terdokumentasi dan tidak dimaksudkan sebagai klasifikasi yang bersifat eksklusif.

Model tiga peran tersebut menunjukkan bahwa posisi aktor dalam jejaring tidak hanya ditentukan oleh identitas kelembagaannya, tetapi oleh kombinasi kewenangan, sumber daya, posisi dalam proses kebijakan, dan bentuk hubungan yang dijalankannya. Karena peran tersebut dapat tumpang tindih, jejaring ISUTW lebih tepat dipahami sebagai konfigurasi fungsi yang dinamis daripada struktur yang sepenuhnya hierarkis. Meskipun demikian, terdapat perbedaan struktural yang cukup jelas antara aktor yang lebih dekat dengan kewenangan pengambilan keputusan dan aktor yang lebih dekat dengan pasar serta publik asing. Informasi mengenai preferensi konsumen, kesulitan bahan baku, regulasi lokal, biaya usaha, dan kebutuhan restoran terutama berada pada aktor yang menjalankan fungsi garis depan, sedangkan kewenangan regulasi, koordinasi, dan pembiayaan terutama berada pada aktor yang menjalankan fungsi *policy-steering*. Karena

itu, fungsi perantara menjadi penting untuk menghubungkan pengetahuan implementasi dengan arena kebijakan. Namun, berdasarkan korpus yang tersedia, penelitian ini hanya dapat mengidentifikasi posisi dan potensi fungsi penghubung tersebut; efektivitas *brokerage* aktual serta sejauh mana informasi dari garis depan memengaruhi keputusan tertentu tidak dapat diverifikasi sepenuhnya melalui analisis dokumen.

Distribusi Sumber Daya dan Interdependensi antara Aktor Negara dan Nonnegara

Analisis dokumen menunjukkan bahwa sumber daya dalam jejaring ISUTW terdistribusi secara tidak merata di antara aktor negara dan nonnegara. Pemerintah menguasai sumber daya formal berupa kewenangan koordinasi, regulasi ekspor-impor, standardisasi, skema pembiayaan, akses diplomatik, data resmi, serta legitimasi program. Laporan kinerja Kemenko Marves memperlihatkan pengembangan dukungan pembiayaan dan koordinasi lintas sektor untuk mendorong ekspansi restoran Indonesia di luar negeri dan promosi produk (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2022). Naskah kebijakan Kementerian Luar Negeri juga menekankan perlunya kerja sama dengan pemerintah asing, pelaku swasta, pemilik restoran, importir, dan organisasi lain dalam riset regulasi, pemasaran, investasi, dan peningkatan kapasitas (Ramanda, 2022). Bukti ini menunjukkan bahwa pemerintah menyediakan kerangka kelembagaan dan akses yang memungkinkan program dijalankan lintas sektor dan lintas negara.

Pada sisi lain, aktor nonnegara menguasai sumber daya substantif dan implementatif yang tidak seluruhnya dapat disediakan oleh birokrasi. Asosiasi gastronomi dan ahli kuliner memiliki pengetahuan mengenai bahan, sejarah, teknik, kualitas, dan representasi kuliner. Organisasi *chef* menguasai keterampilan profesional dan kemampuan menerjemahkan keragaman makanan ke dalam bentuk yang dapat disajikan kepada publik. Pelaku industri dan UMKM menyediakan produk, kapasitas produksi, investasi, teknologi pengolahan, dan distribusi. Diaspora dan restoran memiliki akses langsung kepada konsumen, pengetahuan mengenai preferensi pasar lokal, jaringan komunitas, serta pengalaman menghadapi regulasi dan kondisi usaha di negara tujuan. Dalam jejaring ISUTW, sumber daya tersebut penting karena pelaksanaan gastrodiplomasi tidak hanya membutuhkan kebijakan dan promosi, tetapi juga produk, pelaku usaha, restoran, pengetahuan lokal, dan interaksi langsung dengan publik asing.

Interdependensi muncul karena tidak ada satu aktor yang menguasai seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan program. Kementerian koordinator membutuhkan informasi teknis dan kapasitas implementasi dari kementerian teknis, pelaku usaha, asosiasi, dan pelaksana di lapangan. Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI memiliki akses diplomatik dan informasi negara tujuan, tetapi membutuhkan restoran, diaspora, produk, dan pelaku usaha agar promosi dapat diwujudkan dalam aktivitas nyata. Sebaliknya, restoran, diaspora, UMKM, dan pelaku industri membutuhkan dukungan regulasi, standardisasi, pembiayaan, fasilitasi promosi, dan akses diplomatik untuk memperluas pasar dan mempertahankan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, hubungan negara dan nonnegara tidak hanya berupa keterlibatan paralel, tetapi merupakan hubungan ketergantungan sumber daya yang saling melengkapi.

Namun, interdependensi tersebut tidak menghasilkan posisi yang setara. Pemerintah tetap memiliki kapasitas lebih besar dalam menentukan agenda, aturan, pembiayaan, dan prioritas program karena menguasai sumber daya formal. Sementara itu, aktor nonnegara memiliki sumber daya implementatif yang menentukan keberlangsungan praktik

gastrodiplomasi, tetapi pengaruh mereka terhadap keputusan kebijakan bergantung pada sejauh mana pengetahuan, kebutuhan, dan pengalaman mereka dapat masuk ke forum koordinasi dan proses pengambilan keputusan. Pola ini menjadi dasar untuk membaca ISUTW sebagai konfigurasi *state-led, non-state-dependent network*: negara tetap memimpin secara formal, tetapi pencapaian program bergantung pada sumber daya yang berada di luar negara.

Tabel 4. Distribusi Sumber Daya dan Pola Interdependensi Antaraktor dalam Jejaring ISUTW

Aktor pemilik sumber daya	**Sumber daya yang dikuasai**	**Aktor yang membutuhkan**	**Mekanisme pertukaran yang terdokumentasi**	**Implikasi terhadap implementasi**
Kementerian koordinator	Agenda, koordinasi lintas kementerian, legitimasi program, fasilitasi pembiayaan	Kementerian teknis, pelaku usaha, asosiasi, restoran, diaspora	Koordinasi lintas sektor, penyusunan program, fasilitasi dukungan pembiayaan dan target program	Memungkinkan berbagai sektor bergerak dalam kerangka program bersama, tetapi implementasi tetap bergantung pada kapasitas aktor pelaksana
Kemlu dan perwakilan RI	Akses diplomatik, informasi negara tujuan, jaringan mitra, ruang promosi	Restoran, diaspora, eksportir, pelaku usaha, kementerian teknis	Kerja sama dengan mitra lokal, promosi, fasilitasi kegiatan, penyediaan informasi regulasi dan pasar	Menghubungkan kebijakan nasional dengan arena implementasi di luar negeri
Kementerian teknis/regulator	Regulasi, standardisasi, fasilitasi produksi dan ekspor	UMKM, eksportir, produsen, restoran	Regulasi, standardisasi, fasilitasi teknis, dukungan produksi dan ekspor	Menentukan kesiapan produk dan usaha untuk masuk ke pasar luar negeri
Asosiasi dan ahli gastronomi	Pengetahuan kuliner, kurasi, legitimasi budaya, jaringan profesi	Pemerintah, restoran, *chef*, pelaku usaha	Forum konsultasi, kegiatan promosi, penyediaan pengetahuan dan representasi budaya	Membantu menjaga kualitas representasi kuliner dan menghubungkan pengetahuan profesional dengan program
Pelaku industri dan UMKM	Produk, investasi, kapasitas produksi,	Pemerintah, perwakilan RI, restoran, pasar luar negeri	Penyediaan produk, kerja sama promosi, ekspor, distribusi	Menjadi basis ekonomi program dan menentukan ketersediaan produk yang

	teknologi, distribusi			mendukung promosi kuliner
Diaspora dan restoran	Akses publik, pengalaman pasar lokal, jaringan komunitas, interaksi langsung dengan konsumen	Pemerintah, perwakilan RI, pelaku usaha, regulator	Kegiatan promosi, pengoperasian restoran, interaksi dengan publik, penyampaian pengalaman implementasi yang terdokumentasi dalam kajian dan publikasi	Menjadi pelaksana garis depan dan sumber pengetahuan mengenai kondisi pasar, meskipun pengaruhnya terhadap keputusan kebijakan belum selalu dapat diverifikasi
Chef dan organisasi profesi	Keterampilan profesional, pengetahuan menu, representasi kuliner, jaringan profesi	Pemerintah, restoran, promotor, publik asing	Demonstrasi kuliner, kegiatan promosi, forum profesi, konsultasi	Menerjemahkan keragaman kuliner menjadi pengalaman yang dapat diterima publik dan berpotensi menjembatani kebijakan dengan praktik

Sumber: Analisis dokumen D1–D12. Mekanisme pertukaran pada tabel hanya mencakup hubungan yang terdokumentasi dalam korpus penelitian; interaksi informal dan pengaruh terhadap keputusan tertentu tidak selalu dapat diverifikasi.

Tabel 4 menunjukkan bahwa interdependensi dalam ISUTW tidak hanya bersifat abstrak, tetapi terbentuk dari pertukaran sumber daya yang berbeda antaraktor. Pemerintah menyediakan kewenangan, regulasi, koordinasi, pembiayaan, dan akses diplomatik, sedangkan aktor nonnegara menyediakan produk, pengetahuan kuliner, jaringan pasar, legitimasi budaya, serta akses langsung kepada publik asing. Ketergantungan tersebut memengaruhi implementasi karena keterbatasan pada salah satu sisi dapat menghambat sisi lainnya. Dukungan kebijakan tanpa produk, restoran, dan jaringan pasar tidak cukup menghasilkan pengalaman gastrodiplomasi, sementara kapasitas usaha tanpa dukungan regulasi, fasilitasi, dan akses diplomatik dapat membatasi perluasan pasar. Dengan demikian, konfigurasi *state-led, non-state-dependent network* menggambarkan situasi ketika negara tetap memegang kepemimpinan formal, tetapi keberhasilan implementasi bergantung pada sumber daya yang tersebar pada aktor nonnegara. Namun, korpus penelitian belum memungkinkan pengukuran tingkat ketergantungan masing-masing aktor atau verifikasi seluruh mekanisme pertukaran secara informal.

Diferensiasi Orientasi dan Fragmentasi Tujuan Antaraktor

Jejaring ISUTW menyatukan beberapa logika kebijakan. Dari perspektif perdagangan, keberhasilan dapat diukur melalui nilai ekspor bumbu, rempah, dan pangan olahan. Dari

perspektif industri, perhatian diarahkan pada kapasitas produksi, kualitas, dan daya saing. Dari perspektif pariwisata, gastrodiplomasi dikaitkan dengan branding dan daya tarik destinasi. Dari perspektif diplomasi publik, hasil berkaitan dengan pengenalan, hubungan, dan persepsi publik asing. Sementara itu, pelaku usaha lebih dekat dengan persoalan keberlanjutan restoran, kepastian pasokan, biaya, serta keuntungan, sedangkan aktor gastronomi menekankan kualitas representasi, sejarah, keragaman, dan autentisitas kuliner.

Perbedaan orientasi tersebut bukan masalah dengan sendirinya karena jejaring memang dibentuk untuk menghubungkan sumber daya dan tujuan yang berbeda. Persoalan muncul ketika tidak tersedia mekanisme yang mengubah tujuan sektoral menjadi indikator bersama dan proses pembelajaran lintas aktor. Target kuantitatif memberi arah, tetapi belum sepenuhnya menangkap kualitas hubungan dengan publik, keberlanjutan usaha, representasi budaya, atau kontribusi terhadap produsen domestik. Naskah kebijakan Kementerian Luar Negeri menekankan kebutuhan struktur dan panduan yang lebih terarah, sementara kajian promosi digital menyoroti kebutuhan koordinasi dengan pelaku usaha, diaspora, akademisi, dan media (Ramanda, 2022; Rozuah, 2022).

Kecenderungan koordinasi berbasis kegiatan juga tampak pada festival, pameran, seminar, dan demonstrasi memasak. Kegiatan di Oslo dan Amsterdam pada 2024 memperlihatkan kemampuan perwakilan diplomatik dan mitra lokal mengorganisasi promosi kuliner (Kedutaan Besar Republik Indonesia Oslo, 2024; Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag, 2024). Namun, visibilitas kegiatan tidak otomatis membentuk hubungan yang berkelanjutan dengan pasar, rantai pasok, pembiayaan, atau evaluasi. Dari perspektif jejaring, pertanyaan pentingnya adalah apakah pengalaman yang diperoleh dari kegiatan tersebut masuk kembali ke sistem data, forum koordinasi, dan perbaikan desain program.

Posisi Aktor Pelaksana Garis Depan dalam Struktur Jejaring

Diaspora dan restoran menempati posisi paradoksal. Mereka merupakan aktor yang paling dekat dengan publik asing, tetapi tidak selalu terintegrasi secara kuat ke pusat kebijakan. Penelitian tentang diaspora Indonesia menunjukkan bahwa inisiatif kuliner dapat berkembang melalui restoran dan komunitas bahkan ketika keterhubungannya dengan negara terbatas (Trihartono et al., 2020; Yayusman et al., 2023). Studi Adinda et al. (2025) di Prancis juga memperlihatkan bahwa inisiatif diaspora dapat berkembang secara relatif mandiri dan menghadapi persoalan distribusi produk serta sinergi kebijakan.

Temuan tersebut menunjukkan kesenjangan antara inclusion dan influence. Diaspora atau restoran dapat disebut sebagai mitra strategis, diundang dalam kegiatan, atau tercatat dalam basis data. Namun, keterlibatan formal belum tentu diikuti kemampuan untuk memengaruhi standardisasi, skema pembiayaan, pemilihan target pasar, atau indikator evaluasi. Basis data restoran yang dikembangkan Kementerian Luar Negeri pada 2025 menunjukkan langkah menuju institusionalisasi informasi, tetapi nilai tata kelolanya bergantung pada apakah data tersebut dipakai sebagai sarana komunikasi dua arah, pemetaan kebutuhan, konsultasi, dan pembelajaran kebijakan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025a).

Dengan demikian, masalah utama bukan kurangnya aktor melainkan hubungan antarlevel jejaring. Aktor garis depan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi pasar dan publik, tetapi pengetahuan tersebut hanya bernilai bagi jejaring apabila tersedia jalur umpan balik yang stabil. Tanpa

mekanisme tersebut, jejaring dapat tampak inklusif dari jumlah mitra tetapi tetap asimetris dalam distribusi pengaruh.

Mekanisme Pengelolaan dan Pelembagaan Jejaring ISUTW

Secara formal, ISUTW memiliki koordinator dan target yang jelas. Namun, penunjukan organisasi pemimpin tidak dengan sendirinya menyelesaikan kebutuhan pengelolaan jejaring. Korpus memperlihatkan fungsi mobilisasi dan promosi yang relatif kuat: aktor dapat dikumpulkan, kegiatan dapat diselenggarakan, dan perwakilan diplomatik dapat digunakan sebagai saluran promosi. Bukti mengenai integrasi rutin, arbitrase antarkepentingan, dan pemantauan bersama lebih terbatas. Padahal, perbedaan antara orientasi ekspor, keberlanjutan restoran, autentisitas budaya, dan hasil diplomasi membutuhkan mekanisme penyelarasan yang melampaui koordinasi ad hoc.

Jejaring juga tampak bergantung pada struktur program dan siklus koordinasi pemerintah. Ketergantungan tersebut menimbulkan risiko kesinambungan ketika mandat kelembagaan, anggaran, atau label program berubah. Peluncuran SRASA pada 2025 menunjukkan bahwa agenda gastrodiplomasi tetap berlanjut, tetapi transisi kebijakan perlu menjaga hubungan, data, pembagian peran, dan pembelajaran yang telah terbentuk sebelumnya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025b). Dengan demikian, pelembagaan tidak harus berarti membentuk birokrasi baru yang besar. Yang lebih penting adalah mekanisme koordinasi yang cukup stabil: penanggung jawab yang jelas, basis data bersama, forum konsultasi reguler, mandat broker, dokumentasi lintas siklus, dan sistem evaluasi yang menghubungkan output ekonomi dengan hasil diplomasi publik.

Tabel 5. Kendala Integrasi Jejaring dan Implikasi Pengelolaan ISUTW

Masalah Jejaring	Indikasi dari Dokumen	Implikasi	Kebutuhan Pengelolaan
Perbedaan orientasi sektoral	Target ekonomi, diplomasi, pariwisata, industri, dan budaya berjalan bersamaan	Ukuran keberhasilan terfragmentasi	Indikator bersama dan forum penyelarasan
Peran nonnegara belum jelas	Aktor banyak disebut, tetapi mandat dan akses keputusan tidak selalu terlihat	Partisipasi dapat berhenti pada konsultasi	Mandat, representasi, dan akses keputusan yang lebih jelas
Koordinasi berbasis kegiatan	Promosi banyak dilakukan melalui festival, pameran, dan demo kuliner	Visibilitas tidak otomatis menjadi keberlanjutan	Integrasi kegiatan dengan pasar, pasokan, pembiayaan, dan evaluasi
Umpan balik garis depan lemah	Diaspora/restoran memiliki pengalaman lokal tetapi koneksi kebijakan terbatas	Kebijakan kurang responsif terhadap kendala implementasi	Basis data interaktif dan konsultasi periodik
Ketergantungan pada koordinator	Hubungan terkonsentrasi pada program dan organisasi pemimpin	Jejaring rentan terhadap perubahan struktur	Dokumentasi, mandat broker, dan tata kelola transisi

Sumber: Analisis dokumen D1–D12

PEMBAHASAN

Dari Gastrodiplomasi Berpusat pada Negara menuju State-Led, Non-State-Dependent Network

Temuan penelitian memperhalus perdebatan negara versus nonnegara dalam diplomasi publik. ISUTW tidak sesuai dengan model yang menggambarkan negara sebagai satu-satunya produsen diplomasi, tetapi juga tidak menunjukkan penarikan negara yang menyerahkan diplomasi kepada aktor sosial yang otonom. Institusi pemerintah tetap memegang kewenangan untuk mengoordinasikan kementerian, mengatur perdagangan dan standardisasi pangan, mengalokasikan sumber daya publik, mengelola akses diplomatik, dan menetapkan target program. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa negara tetap memiliki posisi struktural penting dalam diplomasi publik (Yun, 2022). Di sisi lain, nilai praktis program bergantung pada aktor yang sumber dayanya tidak dapat direplikasi secara administratif: chef, asosiasi, produsen, restoran, diaspora, media, dan perantara pasar. Kondisi ini mendukung pendekatan relasional terhadap diplomasi publik yang menekankan distribusi kapasitas komunikasi di luar birokrasi (Ayhan, 2019; Limani & Limani, 2022; Zaharna & Huang, 2022).

Istilah *state-led, non-state-dependent network* digunakan untuk menangkap dualitas tersebut. Istilah ini membedakan kepemimpinan formal dari ketergantungan substantif pada sumber daya aktor lain**.** Organisasi pemerintah dapat berada di pusat jejaring dan tetap membutuhkan sumber daya yang dimiliki pihak lain. Logika tersebut konsisten dengan *governance network*, yakni koordinasi antarorganisasi terjadi karena tidak ada satu aktor yang memiliki seluruh sumber daya untuk menghasilkan tindakan kolektif (Wang & Ran, 2023). Dalam kasus gastrodiplomasi, sumber daya yang sulit digantikan bukan hanya keahlian teknis, tetapi juga kontak berulang dan autentik dengan publik asing melalui restoran, komunitas, produk, dan jaringan profesional.

Interpretasi ini membantu menjelaskan mengapa sebuah program nasional dapat terlihat terpusat secara administratif tetapi tetap tersebar secara operasional. Pemetaan tiga peran jejaring memperlihatkan hubungan antara otoritas kebijakan, fungsi *brokerage*, dan implementasi yang berhadapan langsung dengan publik. Dengan demikian, analisis bergerak melampaui inventaris aktor dan menawarkan struktur yang dapat digunakan untuk membandingkan program gastrodiplomasi di negara lain.

Brokerage sebagai "Missing Middle" dalam Jejaring

Fungsi perantara menjadi penting dalam model jejaring ISUTW karena sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan gastrodiplomasi tersebar pada aktor yang berbeda. Kapasitas diaspora, restoran, *chef*, dan pelaku usaha untuk berinteraksi dengan pasar dan publik asing tidak dengan sendirinya menjamin bahwa pengetahuan dan pengalaman mereka terhubung dengan proses kebijakan. Sebaliknya, otoritas, pembiayaan, regulasi, dan akses diplomatik yang dimiliki pemerintah juga membutuhkan saluran yang dapat menghubungkannya dengan pengetahuan profesional, jaringan usaha, dan pengalaman implementasi. Dalam pengertian ini, *brokerage* merujuk pada fungsi menghubungkan aktor atau arena yang berbeda, menerjemahkan kebutuhan dan informasi antarorganisasi, serta memfasilitasi pertemuan sumber daya yang tersebar dalam jejaring.

Bukti dokumenter paling jelas mengenai fungsi tersebut ditemukan pada fase pembentukan agenda melalui Kongres Gastrodiplomasi Indonesia pada 2020. Yayusman dan Mulyasari (2024) menunjukkan bahwa forum tersebut diprakarsai oleh aktor nonnegara dan mempertemukan pemerintah, *chef*, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, serta

komunitas. Dalam korpus penelitian, Indonesia Culinary Institute (ICI) tercatat sebagai salah satu aktor yang berperan dalam mempertemukan kelompok-kelompok tersebut sebelum ISUTW diformalkan. Berdasarkan aktivitas yang terdokumentasi itu, ICI dapat diidentifikasi menjalankan fungsi penghubung pada tahap pembentukan agenda, yaitu menyediakan arena pertemuan lintas kelompok dan membantu mengartikulasikan isu gastrodiplomasi ke dalam agenda yang lebih terkoordinasi. Bukti ini merupakan dasar empiris yang lebih kuat untuk membaca ICI sebagai aktor yang menjalankan fungsi *brokerage*, meskipun korpus tidak memungkinkan penelitian ini mengukur sejauh mana aktivitas tersebut secara langsung mengubah keputusan kebijakan tertentu.

Pada aktor lain, seperti Dewan Rempah Indonesia, asosiasi industri, asosiasi gastronomi, organisasi *chef*, dan asosiasi jasa boga, korpus menunjukkan kepemilikan sumber daya yang mendukung potensi fungsi perantara, seperti jaringan anggota, pengetahuan profesional, legitimasi budaya, dan kemampuan mengagregasi kepentingan. Namun, keberadaan sumber daya tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa mereka secara aktual dan konsisten menjalankan fungsi *broker* sepanjang siklus ISUTW. Karena itu, penelitian ini membedakan antara aktor yang memiliki kapasitas atau posisi intermediari dan aktor yang fungsi *brokerage*-nya dapat ditelusuri melalui aktivitas penghubung yang secara eksplisit terdokumentasi. Dalam klasifikasi sebelumnya, asosiasi dan organisasi profesional memang ditempatkan pada peran perantara karena menguasai jaringan, reputasi, pengetahuan, dan kemampuan agregasi kepentingan, tetapi bukti dokumenter mengenai fungsi aktualnya tidak sama kuat untuk setiap organisasi.

Kajian *governance network* menunjukkan bahwa *brokerage* dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi fragmentasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada posisi kelembagaan, akses terhadap forum, dan keberlanjutan hubungan (Hu et al., 2023). Temuan ISUTW menunjukkan bahwa fungsi penghubung telah muncul pada fase tertentu, terutama dalam konsolidasi awal agenda, tetapi korpus memberikan bukti yang lebih terbatas mengenai pelembagaan fungsi tersebut secara konsisten selama implementasi. Karena itu, persoalan utama bukan semata-mata ada atau tidaknya aktor perantara, melainkan apakah tersedia mekanisme yang stabil untuk membawa informasi dari pelaksana garis depan ke arena koordinasi dan, sebaliknya, menerjemahkan kebijakan ke kebutuhan profesi, usaha, dan pasar.

Dalam konteks tersebut, *brokerage* dapat dipahami sebagai "*missing middle*" ketika jejaring memiliki aktor di tingkat pengarah kebijakan dan pelaksana garis depan, tetapi mekanisme penghubung di antara keduanya belum terlembagakan secara kuat. Istilah ini tidak berarti bahwa ISUTW sama sekali tidak memiliki aktor perantara, melainkan bahwa fungsi penghubung yang terdokumentasi belum menunjukkan mandat, akses, dan mekanisme umpan balik yang konsisten sepanjang siklus kebijakan. Implikasinya bukan mendorong sentralisasi seluruh hubungan di bawah pemerintah, tetapi memperkuat mekanisme intermediari melalui forum konsultasi reguler, akses terhadap arena koordinasi, serta saluran umpan balik yang memungkinkan pengetahuan implementasi masuk ke proses kebijakan.

Asimetri antara Inklusi dan Distribusi Pengaruh

Kontribusi kedua berkaitan dengan pembedaan antara inclusion dan influence. Program diplomasi publik sering melaporkan keterlibatan melalui jumlah mitra, kegiatan, komunitas, atau bisnis yang berpartisipasi. Indikator tersebut menggambarkan jangkauan,

tetapi tidak menjelaskan distribusi kekuasaan. Reggi et al. (2022) menegaskan bahwa jejaring yang inklusif membutuhkan akses sekaligus kemungkinan untuk memengaruhi keputusan. Korpus ISUTW menunjukkan relevansi pembedaan ini: aktor garis depan dapat sangat terlihat dan penting bagi implementasi, tetapi akses mereka terhadap keputusan mengenai pembiayaan, standardisasi, target pasar, dan evaluasi tidak selalu terdokumentasi secara jelas.

Kesenjangan tersebut bukan hanya masalah partisipasi, melainkan persoalan tata kelola sumber daya. Pemerintah membutuhkan pengetahuan garis depan justru karena operator restoran dan diaspora berhadapan langsung dengan konsumen, aturan lokal, masalah pasokan, dan kondisi bisnis. Jika pengetahuan tersebut tidak bergerak ke atas, jejaring kehilangan sebagian keuntungan yang menjadi alasan kolaborasi multi-aktor. Kajian tentang kekuasaan dalam jejaring juga mengingatkan bahwa struktur yang tampak kolaboratif dapat mereproduksi ketimpangan pengaruh ketika agenda dan sumber daya tetap terkonsentrasi (Maron & Benish, 2022; Naveed & Azhar, 2022).

Bagi ISUTW, basis data restoran dan jaringan perwakilan diplomatik dapat dikembangkan bukan hanya sebagai inventaris, tetapi sebagai infrastruktur konsultasi dan pembelajaran kebijakan. Informasi menjadi bernilai bagi tata kelola ketika mampu mendukung representasi, umpan balik, dan adaptasi. Hal ini penting karena tujuan gastrodiplomasi menggabungkan kinerja ekonomi dan penciptaan daya tarik publik; keduanya tidak dapat dinilai hanya dari visibilitas kegiatan.

Pelembagaan Jejaring dan Keberlanjutan Kapasitas Kolaboratif

Temuan ketiga berkaitan dengan pengelolaan jejaring. ISUTW memperlihatkan kapasitas mobilisasi yang cukup kuat: pemerintah dapat mempertemukan aktor, meluncurkan program, menggunakan venue diplomatik, dan mengorganisasi kegiatan promosi. Titik yang lebih lemah adalah pelembagaan hubungan melampaui event dan siklus anggaran. Wegner dan Verschoore (2022) menunjukkan bahwa tata kelola jejaring membutuhkan sejumlah fungsi pengelolaan sekaligus, termasuk penyelarasan, integrasi, arbitrase, dan pemantauan. Krogh (2022) juga menekankan perlunya struktur fasilitasi ketika jejaring yang dimandatkan pemerintah berisi aktor dengan tujuan dan otoritas berbeda.

Koeksistensi logika diplomasi, perdagangan, pariwisata, industri, budaya, dan bisnis membuat fungsi tersebut semakin penting. Target jumlah restoran dapat mendorong ekspansi tetapi tidak langsung mengukur keberlanjutan usaha, kualitas representasi budaya, atau kedekatan dengan publik asing. Target ekspor dapat menangkap output ekonomi tetapi tidak mewakili seluruh efek diplomasi publik. Karena itu, jejaring membutuhkan indikator lintas sektor yang tidak mereduksi seluruh tujuan ke satu ukuran. Kesimpulan ini sejalan dengan kajian akuntabilitas jejaring yang menekankan pentingnya kesesuaian antara tugas kolektif dan pengaturan tata kelola agar kinerja dapat dinilai secara masuk akal (Saz-Carranza et al., 2020).

Kesinambungan kelembagaan juga penting. Desain formal dan strategi pengelolaan dapat memperkuat atau justru memutus modal relasional yang terbentuk selama implementasi (Busscher et al., 2022; van den Oord et al., 2023). Karena itu, transisi dari ISUTW ke agenda lanjutan perlu dibaca sebagai tantangan governance: hubungan, data, rutinitas, dan pembelajaran apa yang dibawa ke program berikutnya? Mekanisme koordinasi yang ringkas tetapi stabil, didukung data bersama dan konsultasi lintas peran

jejaring secara teratur, kemungkinan lebih bernilai daripada mobilisasi ulang untuk rangkaian kegiatan yang berdiri sendiri.

Gastrodiplomasi Berjejaring sebagai Lensa Analitis

Lensa analitis gastrodiplomasi berjejaring memperluas pembacaan terhadap gastrodiplomasi dalam dua arah. Pertama, lensa ini menggeser perhatian analitis dari makanan sebagai instrumen menuju hubungan antarlembaga yang memungkinkan makanan berfungsi sebagai diplomasi. Kajian gastrodiplomasi semakin memperhatikan agen implementasi, khususnya diaspora dan restoran, tetapi masih memerlukan pembacaan yang mampu menjelaskan bagaimana kebijakan nasional, keahlian profesional, pasar, dan aktor yang berhadapan langsung dengan publik saling terhubung (Li & Mok, 2025). Pemetaan tiga peran jejaring *policy-steering core*, *intermediary/broker*, dan *frontline implementers* menyediakan salah satu cara untuk membaca hubungan tersebut tanpa menganggap ketiganya sebagai kategori yang kaku atau saling eksklusif.

Kedua, gastrodiplomasi berjejaring memandang daya tarik nasional sebagai sesuatu yang diproduksi bersama, tetapi tidak selalu dikelola secara setara. Publik asing mengalami gastrodiplomasi terutama melalui makanan yang dikonsumsi, restoran yang dikunjungi, produk yang dibeli, festival yang dihadiri, serta narasi yang disampaikan oleh *chef*, diaspora, media, dan komunitas. Dengan demikian, daya tarik nasional diproduksi melalui sumber daya dan interaksi yang tersebar di antara berbagai aktor. Namun, kewenangan untuk menentukan agenda, prioritas, aturan, dan alokasi sumber daya tetap terdistribusi secara tidak merata. Lensa gastrodiplomasi berjejaring membantu menangkap kedua kondisi tersebut secara bersamaan: produksi nilai diplomatik yang terdistribusi dan tata kelola jejaring yang tetap asimetris.

Lensa ini juga memiliki potensi komparatif. Penelitian selanjutnya dapat menguji apakah program gastrodiplomasi di negara lain menunjukkan konfigurasi *state-led, non-state-dependent*, lebih terdesentralisasi, atau lebih *business-led*; sejauh mana fungsi *brokerage* dilembagakan; serta apakah aktor garis depan memiliki akses yang stabil terhadap forum koordinasi dan proses pembelajaran kebijakan. Dengan demikian, penggunaan lensa gastrodiplomasi berjejaring dapat membantu mengembangkan kajian gastrodiplomasi dari pemetaan kampanye dan aktor secara deskriptif menuju analisis yang lebih relasional mengenai distribusi sumber daya, interdependensi, dan pengaruh dalam proses kebijakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program *Indonesia Spice Up the World* lebih tepat dipahami sebagai jejaring tata kelola daripada semata-mata kampanye promosi makanan. Analisis mengidentifikasi tiga peran dominan dalam jejaring, yaitu *policy-steering core*, *intermediary/broker*, dan *frontline implementers*. Ketiga peran tersebut tidak bersifat eksklusif dan dapat tumpang tindih menurut arena dan tahap kebijakan. Pemerintah memimpin jejaring melalui kewenangan koordinasi, regulasi, pembiayaan, data resmi, dan akses diplomatik, sementara aktor nonnegara menguasai sumber daya implementatif berupa pengetahuan kuliner, legitimasi budaya, produk, jaringan pasar, kreativitas, pengalaman lokal, dan interaksi langsung dengan publik asing. Kombinasi tersebut mendukung pembacaan ISUTW sebagai konfigurasi *state-led, non-state-dependent network*.

Masalah utama jejaring bukan kekurangan aktor, melainkan integrasi yang belum sepenuhnya terlembaga. Perbedaan orientasi sektoral menghasilkan ukuran keberhasilan yang terfragmentasi; mandat aktor nonnegara tidak selalu jelas; koordinasi promosi lebih

terlihat dibanding integrasi rutin dan pemantauan bersama; serta pengalaman pelaksana garis depan belum terdokumentasi secara konsisten sebagai bagian dari mekanisme umpan balik kebijakan. Implikasi kebijakan penelitian adalah perlunya penguatan fungsi *broker*, forum konsultasi reguler, basis data bersama yang bersifat interaktif, pembagian peran tertulis, indikator lintas sektor, serta mekanisme kesinambungan yang melampaui kegiatan dan pergantian label program.

Secara akademik, penelitian ini mengembangkan *networked gastrodiplomacy* sebagai lensa analitis yang spesifik pada domain gastrodiplomasi untuk menjelaskan bagaimana daya tarik nasional diproduksi melalui hubungan interdependen dan pertukaran sumber daya lintas organisasi. Lensa ini menegaskan bahwa keterlibatan banyak aktor tidak otomatis menghasilkan distribusi pengaruh yang setara dan bahwa kepemimpinan formal negara dapat berjalan bersamaan dengan ketergantungan substantif pada sumber daya aktor nonnegara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas dukungan kelembagaan dan kontribusi akademik dalam pelaksanaan penelitian ini, serta kepada Universitas Brawijaya atas fasilitasi dan dukungan melalui Program Dosen Berkarya (DOKAR). Artikel ini merupakan salah satu luaran akademik dari program tersebut.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan terkait penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika penelitian akademik, khususnya dalam penggunaan, pengutipan, dan interpretasi sumber data secara bertanggung jawab. Penelitian menggunakan metode analisis dokumen terhadap dokumen kebijakan, publikasi resmi, dataset, dan artikel ilmiah yang dapat diakses secara publik serta tidak melibatkan manusia sebagai responden atau informan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memerlukan *informed consent* maupun persetujuan komite etik yang berkaitan dengan penelitian terhadap subjek manusia. Seluruh sumber digunakan dengan memperhatikan ketepatan atribusi, transparansi sumber data, serta integritas akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Abhiyoga, N., & Febreani, Y. K. (2021). Strategi gastrodiplomasi tempe oleh diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Padjadjaran Journal of International Relations, 3(2), 186–198. https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.31172.

Adinda, I. M. D., Trihartono, A., & Indriastuti, S. (2025). Gastrodiplomasi Indonesia di Prancis: Pandangan diaspora Indonesia. Journal of Urban Sociology, 8(2), 126–143. https://doi.org/10.30742/jus.v8i2.4746

Al Ghafiqi, A. F. (2023). Gastrodiplomasi: Strategi Indonesia dalam membangun nation branding di kancah internasional. Journal of International Relations, 9(2), 140–152. https://doi.org/10.14710/JIRUD.V9I2.38440

Ayhan, K. J. (2019). The boundaries of public diplomacy and nonstate actors: A taxonomy of perspectives. International Studies Perspectives, 20(1), 63–83. https://doi.org/10.1093/isp/eky010

Busscher, T., Verweij, S., & van den Brink, M. (2022). Private management of public networks? Unpacking the relationship between network management strategies in infrastructure implementation. Governance, 35(2), 477–495. https://doi.org/10.1111/gove.12602

Dalglish, S. L., Khalid, H., & McMahon, S. A. (2020). Document analysis in health policy research: The READ approach. Health Policy and Planning, 35(10), 1424–1431. https://doi.org/10.1093/heapol/czaa064

Fathun, L. M. (2023). IRs public diplomacy strategy of Indonesia: Case study Indomie gastrodiplomacy. Jurnal Asia Pacific Studies, 7(1), 1–10. https://doi.org/10.33541/japs.v7i1.4670

Fonseca, D. R. da. (2021). Exploring government networks through interorganizational relationships: Research strategies based on social network analysis (SNA). International Journal of Public Sector Management, 34(6), 651–672. https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2020-0296

Hu, Q., Medina, A., Siciliano, M. D., & Wang, W. (2023). Network structures and network effects across management and policy contexts: A systematic review. Public Administration, 101(3), 953–972. https://doi.org/10.1111/padm.12835

Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag. (2024, October 16). Indonesia Spice Week di Amsterdam menampilkan warisan kaya rempah-rempah Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. https://kemlu.go.id/denhaag/berita/indonesia-spice-week-di-amsterdam-menampilkan-warisan-kaya-rempah-rempah-indonesia?type=publication

Kedutaan Besar Republik Indonesia Oslo. (2024, May 28). Festival Indonesia Spice Up Oslo 2024: Mewarnai Kota Oslo dengan aroma dan warna Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2020, October 8). Ingin kuliner Indonesia mendunia, Kemenko Marves koordinasikan penyusunan Indonesia Spice Up the World. https://www.maritim.go.id/detail/ingin-kuliner-indonesia-mendunia-kemenko-marves-koordinasikan-penyusunan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2022). Laporan kinerja tahun 2022. https://maritim.go.id/uploads/magazine/20230410112507-2023-04-10magazine112504.pdf

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021, November 5). Dubai Expo 2020: Showcase persembahan Indonesia sebagai Land of Diversity kepada dunia. https://ekon.go.id/publikasi/detail/3423/dubai-expo-2020-showcase-persembahan-indonesia-sebagai-land-of-diversity-kepada-dunia

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025a). Data sebaran restoran Indonesia di luar negeri pada tahun 2025 [Data set]. Satu Data Kementerian Luar Negeri. https://satudata.kemlu.go.id/data/data-restoran-indonesia-di-luar-negeri-2025

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025b, August 28). Sinergi lintas kementerian luncurkan S'RASA: Gastrodiplomasi Indonesia lewat rempah dan rasa. https://kemlu.go.id/berita/sinergi-lintas-kementerian-luncurkan-srasa-gastrodiplomasi-indonesia-lewat-rempah-dan-rasa?type=publication

Klijn, E. H., Koppenjan, J., Spekkink, W., & Warsen, R. (2025). Governance networks in the public sector (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003402138

Krogh, A. H. (2022). Facilitating collaboration in publicly mandated governance networks. Public Management Review, 24(4), 631–653. https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1862288

Li, G., & Mok, K. (2025). More than two decades of gastrodiplomacy: A review of the concept, current characteristics, and future trends. Frontiers in Political Science, 7, 1659162. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1659162

Limani, B., & Limani, E. (2022). 'Let us talk': Incorporating the Coordinated Management of Meaning's communication perspective as part of public diplomacy efforts between government, the private sector, and the foreign public. Humanities and Social Sciences Communications, 9, 290. https://doi.org/10.1057/s41599-022-01308-z

Maron, A., & Benish, A. (2022). Power and conflict in network governance: Exclusive and inclusive forms of network administrative organizations. Public Management Review, 24(11), 1758–1778. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1930121

Moise, R. (2023). Diaspora diplomacy and modes of engagement: The case of Romanian diaspora in the UK. Journal of Communication Management, 27(2), 173–190. https://doi.org/10.1108/JCOM-09-2022-0108

Naveed, S., & Azhar, A. (2022). Structure, governance and challenges of networks in the public sector: The case of the power network in Pakistan. International Journal of Public Sector Management, 35(1), 16–33. https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2020-0343

Pujayanti, A. (2017). Gastrodiplomasi: Upaya memperkuat diplomasi Indonesia. Politica, 8(1), 38–56. https://doi.org/10.22212/jp.v8i1.884

Putri, D. M. (2026). Strategi gastrodiplomasi Indonesia pada era Joko Widodo. Anterior Jurnal, 25(2), 16–23. https://doi.org/10.33084/anterior.v25i2.12149

Ramanda, R. (2022). Supporting Indonesia Spice Up the World program: Strategic role of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia [Training material]. Perpustakaan Kementerian Luar Negeri. https://perpustakaan.kemlu.go.id/index.php?id=514&keywords=&p=show_detail

Reggi, L., Dawes, S. S., & Gil-Garcia, J. R. (2022). The effects of open government data on the inclusiveness of governance networks: Identifying management strategies and success factors. Information Polity, 27(4), 473–490. https://doi.org/10.3233/IP-220004

Rockower, P. S. (2012). Recipes for gastrodiplomacy. Place Branding and Public Diplomacy, 8(3), 235–246. https://doi.org/10.1057/pb.2012.17

Rozuah, R. M. (2022). Prioritizing digital promotion of Indonesia Spice Up the World [Training material]. Perpustakaan Kementerian Luar Negeri. https://perpustakaan.kemlu.go.id/index.php?id=275&keywords=&p=show_detail

Saz-Carranza, A., Albareda, A., & Federo, R. (2020). Network tasks and accountability: A configurational analysis of EU regulatory networks. Public Administration, 98(2), 480–497. https://doi.org/10.1111/padm.12631

Trihartono, A., Santoso, B., Hara, A. E., Pamungkas, F. Z., & Viartasiwi, N. (2020). Frontline messenger: Preliminary study on Indonesian diaspora in gastrodiplomacy. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 485, 012009. https://doi.org/10.1088/1755-1315/485/1/012009

Turgarini, D., Lestari, N. P., Soeroso, A., & Wulandari, L. W. (2025). Upaya diaspora memoderasi gastrodiplomasi hijau 'Nusantara' di Tokyo untuk meningkatkan citra

Indonesia. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 10(1), 164–175. https://doi.org/10.21067/jmk.v10i1.11176

Van den Oord, S., Kenis, P., Raab, J., & Cambré, B. (2023). Modes of network governance revisited: Assessing their prevalence, promises, and limitations in the literature. Public Administration Review, 83(6), 1564–1598. https://doi.org/10.1111/puar.13736

Wang, H., & Ran, B. (2023). Network governance and collaborative governance: A thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. Public Management Review, 25(6), 1187–1211. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2011389

Wegner, D., & Verschoore, J. (2022). Network governance in action: Functions and practices to foster collaborative environments. Administration & Society, 54(3), 479–499. https://doi.org/10.1177/00953997211024580

White, W., Barreda, A. A., & Hein, S. (2019). Gastrodiplomacy: Captivating a global audience through cultural cuisine—A systematic review of the literature. Journal of Tourismology, 5(2), 127–144. https://doi.org/10.26650/JOT.2019.5.2.0027

Wijaya, M. S., Simanjuntak, T. R., & Nau, N. U. W. (2024). Peran diaspora dalam mendukung gastrodiplomasi pada program co-branding Indonesia di Australia 2018–2020. Jurnal Niara, 17(2), 531–540. https://doi.org/10.31849/niara.v17i2.23158

Yayusman, M. S., & Mulyasari, P. N. (2024). Indonesia's spice-based gastrodiplomacy: Australia and Africa continents as the potential markets. Journal of ASEAN Studies, 12(1), 51–77. https://doi.org/10.21512/jas.v12i1.8004

Yayusman, M. S., Yaumidin, U. K., & Mulyasari, P. N. (2023). On considering Australia: Exploring Indonesian restaurants in promoting ethnic foods as an instrument of Indonesian gastrodiplomacy. Journal of Ethnic Foods, 10, 43. https://doi.org/10.1186/s42779-023-00207-1

Yun, S.-H. (2022). Against the current: Back to public diplomacy as government communication. International Journal of Communication, 16, 3047–3064.

Zaharna, R. S., & Huang, Z. A. (2022). Revisiting public diplomacy in a postpandemic world: The need for a humanity-centered communication logic. Communication and the Public, 7(1), 7–14. https://doi.org/10.1177/20570473221078619